

# **ANALYSIS SWOT CIVIC EDUCATION CURRICULUM FOR SENIOR HIGH SCHOOL YEAR 1975-2013**

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JENJANG SMA TAHUN 1975 – 2013**

**Gunawan Santoso<sup>1</sup> Suwarma Al Muchtar<sup>2</sup> Aim Abdulkarim<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang (UNNES)

<sup>2</sup>Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

<sup>3</sup>Dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

Email: mgunawansantoso@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Civics curriculum from year 1975-2013 are ultimately aims to make citizens say, act, and behave, based on Pancasila or spirit in everyday life that are run from the time school education to become a high school mature and become the pride of the nation bless yourself, family, school, state and nation with the moral soul/good and intelligent character who can advance and competitive in national and international era. Civics strength is on the Pancasila, the 1945 Constitution, values, morals, local knowledge and diversity in cultured. There are weaknesses in the teaching of Civics monotonous and more innovative not only focuses on the cognitive, affective and psychomotor while dispensed and not included on the national exam. Opportunities Civics still need a lot of development in the scientific body of knowledge. Threats of civics is free sex of number of students who make the nation weak morals and act not see the value of Pancasila (say and behave without values). Civics solution through a process of learning and practice of students in the school are monitored and assessed as a form of moral evaluation and student behavior.*

**Keyword: SWOT, Curriculum Civic Education SMA, years 1975-2013.**

### **ABSTRAK**

*Kurikulum PKn dari tahun 1975-2013 adalah menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa pancasilais dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan PKn ada pada Pancasila, UUD 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal dan kebinekaan dalam berkebudayaan. Kelemahan PKn ada pada sisi pengajaran yang bersifat monoton tidak inovatif dan lebih menitik beratkan hanya pada kognitif, sedangkan afektif dan psikomotorik ditiadakan serta tidak dimasukkan pada ujian nasional. Peluang PKn masih perlunya banyak perkembangan keilmuan dalam body of knowledge berbasis penguatan utama moral. Ancaman PKn adalah seks bebas yang menjadikan moral anak bangsa lemah dan bertindak tidak melihat nilai Pancasila (berkata dan berperilaku tanpa nilai). Solusi PKn melalui pembelajaran dan proses praktik siswa di sekolah yang diawasi dan dinilai sebagai bentuk evaluasi moral dan perilaku siswa.*

**Kata Kunci: SWOT, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan SMA, tahun 1975-2013.**

Kurikulum pendidikan Indonesia sudah mengalami perkembangan sejak periode sebelum tahun 1947 hingga kurikulum tahun 2006, bahkan munculnya kurikulum baru yang akan menggantikan

kurikulum lama yaitu kurikulum tahun 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhammad Nuh (Kompas, 5/9/2012).

“Tidak ada kurikulum yang abadi. Kurikulum berubah karena perubahan zaman, bukan karena kurikulum sekarang yang jelek atau salah. Sudah benar itu di zamannya. Tapi zaman berubah dan kita harus ikut berubah”.

Analisisnya ialah proses pergantian Kurikulum tidak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah agar siswa/pelajar di Indonesia menjadi sumber daya yang berkualitas di jamannya.

Menurut beberapa pakar, perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik di Indonesia maupun di negara lain, disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berkembang dan tuntutan zaman yang cenderung berubah. Perkembangan kurikulum dianggap sebagai penentu masa depan anak bangsa. Karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara.

Salah satunya ide mengevaluasi kurikulum bergulir cepat setelah Wakil Presiden Boediono mempublikasikan gagasan tentang reformasi pendidikan melalui artikel “Pendidikan Kunci Pembangunan” Kompas, 27 Agustus 2012 (Buku Kompas, 2013: XIV). Artikel tersebut tampaknya merupakan uraian tentang pilar pembangunan nasional (*pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment*) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar RAPBN 2013. Yang menarik ide-idenya ialah mengusung paradigma pembangunan nasional, pemerintah ingin mengevaluasi (lagi) kurikulum pendidikan nasional, khususnya jenjang SD hingga SMA. Alasannya, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, “banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan”, evaluasi dimaksudkan agar pembelajaran lebih efektif. Untuk itu pemerintah membentuk tim evaluasi kurikulum dan meminta berbagai profesi dan keahlian melakukan

evaluasi secara independen (Buku Kompas, 2013: XIII).

Mendikbud Muhammad Nuh, prihatin atas perilaku kekerasan yang melibatkan pelajar (dan mahasiswa) yang terus marak belakangan ini, dan berpikir bahwa kendurnya kurikulum pendidikan sekolah menjadi salah satu sebab kekerasan kaum pelajar tersebut, begitupun dengan para pemikir pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab dan kerja-bersama institusi keluarga, institusi masyarakat, dan diwaktu kemudian, institusi sekolah. Proses perubahan sosial dan terbentuknya keadaban publik hanya mungkin terjadi secara optimal jika ketiga pilar pendidikan berpungsi secara seimbang dan proporsional sesuai kapasitasnya (Buku Kompas, 2013: XVI).

Maka perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk segera dirubah dalam dunia pendidikan dikarenakan merupakan dasar dalam dunia pendidikan menuju warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) di masa depan sebagai cita-cita pendidikan Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37 dinyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Tinggi”. Pendidikan Kewarganegaraan diberbagai jenjang pendidikan harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Tulisan berikut ini mencoba memberikan pilihan jawaban atas permasalahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Sekolah Menengah Atas tahun 1975-2013. Permasalahan pertama makna filosofis apa yang ada pada Sekolah Menengah Atas diberikan materi pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan dari tahun 1975-2013 di Indonesia. Kedua apa dan bagaimana analisis SWOT, kurikulum SMA tahun 1975-2013. Penelitian bertujuan

mendeskripsikan arti kebermaknaan secara filosofis dan analisis SWOT kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas tahun 1975-2013, diharapkan menghasilkan temuan komposisi materi Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam kurikulum SMA tahun 1975-2013 sebagai evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan serta antisipatif dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi.

## **METODE**

Metodologi penelitian merupakan suatu teknik untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, Sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua, sumber data berupa dokumen analisis yang meliputi hasil dokumen-dokumen kenegaraan tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah atas dari tahun 1975-2013.

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi dokumentasi, dan studi pustaka.. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-18).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan analisis peneliti dalam menelaah studi dokumentasi dan studi kepustakaan didapatkan rangkuman oleh peneliti dalam beberapa aspek analisis yaitu: landasan hukum PKn, latar belakang kurikulum, nama kurikulum, nama PKn, tujuan PKn, jumlah jam pelajaran PKn SMA, model pembelajaran PKn, Berakhirnya kurikulum PKn, ruang lingkup, serta analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan solusi). Kurikulum yang dibahas peneliti yaitu

kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA pada tahun 1975-2013, yang dikaji lebih dalam mengenai analisis SWOT kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA pada tahun 1975-2013.

Hasil yang didapatkan peneliti memberikan kontribusi sebagai evaluasi pasang surutnya Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA dari tahun 1975-2013, yang secara jelas telah memberikan data dan fakta perubahan yang signifikan, baik itu perubahan nama mata pelajaran atau substansi materi pelajaran yang memberikan dasar dan arahan sebagai pembeda kurikulum sebelumnya untuk memberikan keunggulan dan kebermaknaan di setiap kurikulum. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama dan materinya secara berkala sesuai dengan perubahan kurikulum yaitu pada tahun 1975, 1978, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Efek perubahan kurikulum membentuk Pendidikan Kewarganegaraan kadang menjadi kuat kadang menjadi lemah, bahkan bersumber pada kekuatan moral, kadang bersumber pada kekuatan hukum, pada kekuatan politik atau bahkan pada kekuatan hukum dan politik.

Di bawah ini adalah hasil rangkuman peneliti tentang analisis kurikulum PKn jenjang SMA:  
**Tabel 1. Rangkuman Analisis Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan Perkembangan Kurikulum PKn SMA dari Tahun 1975-2013 di Indonesia**

No.	Aspek Analisis	Kurikulum 1975	P4 Tahun 1979	Kurikulum 1984	Kurikulum 1994	Suplemen 1999	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Landasan hukum PKn	Tap MPR dan GBHN	Tap MPR dan GBHN	Tap MPR dan GBHN	Tap MPR dan UU PN no 2 tahun 1989	Tap MPR dan UU PN no 2 tahun 1989	UU SPN no. 20 tahun 2003	UU SPN no. 20 tahun 2003	UU SPN no. 20 tahun 2003
2.	Latar belakang kurikulum	Tuntutan perubahan jaman	Tuntutan perubahan eksekutif dan legislatif	Tuntutan perubahan jaman	Tuntutan perubahan jaman perubahan prilaku rakyat	Tuntutan perubahan politik	Tuntutan perubahan jaman dan tenaga kerja	Tuntutan perubahan jaman dan IPTEK	Tuntutan eksekutif, Prilaku masyarakat dan IPTEK
3.	Nama kurikulum	Pembaharuan Kurikulum (PK)	Pembaharuan Kurikulum (PK)	Pembaharuan Kurikulum (PK)	Kurikulum keterampilan proses (KKP)	Kurikulum keterampilan proses (KKP)	Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)	Kurikulum 2013 (Kutilas)
4.	Nama PKn	PMP	PMP+P4	PMP	PPKn	PPKn	Kn	PKn	PPKn
5.	Tujuan PKn	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang berakhlak	Warganegara yang berakhlak	Warganegara yang kritis demokratis	Warganegara yang taat pada pancasila dan UUD 1945
6.	Juml. jam PKn SMA	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	Model PKn	Siswa aktif	Siswa aktif	CBSA	Keterampilan	Keterampilan	Pengalaman	Memecahkan solusi, inkuiri	<i>Contektual learning</i>
8.	Berakhirnya kurikulum PKn	Siswa Kesulitan dalam praksis	Adanya revisi pada P4	Minimnya keterampilan siswa	Reformasi politik eksekutif	Reformasi pendidikan	Belum memiliki kemampuan	Serat materi	Serat materi, jam Pelajaran kurang, dan tidak UN
9.	Ruang lingkup	<i>civics</i> , sejarah kebangsaan, kejadian setelah Indonesia merdeka, UUD 1945, masing-	Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan	hak azasi manusia, azas dan makna keadilan, UUD 1945, lembaga-	(1). Nilai, moral dan norma serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam	1999 ketika masa pemerintahan B. J. Habibie lahir istilah IPTEK dan	1. Persatuan bangsa dan negara; 2. Nilai dan norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan	Persatuan dan Kesatuan bangsa; Norma, hukum dan peraturan; Hak asasi manusia;	1. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, 2. UUD 1945 sebagai hukum

		<p>masing sila Pancasila, pesan pentingnya pembangunan (seperti rencana pembangunan lima tahun dan GBHN) bagi bangsa Indonesia, doktrin kenegaraan yang spesifik, membahas persoalan moral dan sebagainya, visi misinya berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945</p>	<p>Pengamalan Pancasila (P4)</p>	<p>negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, dan kajian terhadap Pancasila itu sendiri.</p>	<p>kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (2). Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p>	<p>IMTAK yang diikuti lahimya kurikulum lmtak, isinya adalah mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran.</p>	<p>hukum); 3. Hak Asasi Manusia; 4. Kebutuhan hidup warga negara; 5. Kekuasaan dan politik; 6. Masyarakat demokratis; 7. Pancasila dan konstitusi negara; 8. Globalisasi; namun materi mata pelajaran ini mengusung misi pendidikan nilai dan moral.</p>	<p>Kebutuhan warga negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi.</p>	<p>dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	---

10.	Dokumen PKN	Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.	adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), maka materi PMP didasarkan pada isi P-4 tersebut.	adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan perlunya adanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.	masih ada yang perlu disempurnakan salah satunya penyederhanaan P4 / refisi P4.	salah satunya mengilangkan P4 dalam materi PPKn, karena terlalu sarat materi, tumpang tindih ( <i>over lapping</i> dan <i>overload</i> ), terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralis.	Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.	terlepas dari pemerintah yang berkuasa, melainkan diberikan kebebasan sekolah untuk mengelola dan mengurus visi dan misinya untuk mencapainya tanpa harus menunggu perintah dari pusat pendidikan maka, hasilnya menumbuhkan generasi mandiri, berteknologi, berpikir cerdas dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.	kutulas/kurikulum 2013 yang memiliki tujuan untuk membekali kemampuan keterampilan secara kritis cerdas dan agar lebih sempurna menjadi manusia yang mandiri dan lebih setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan sumber konten materi pelajaran 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10.	Kekuatan	Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Perubahan nama ini terjadi karena Orde Baru ingin melakukan koreksi terhadap Orde Lama yakni	(1) P-4 merupakan sumber, dan tempat berpijak, isi, dan cara evaluasi PMP melalui pembakuan Kurikulum 1975. (2) Dengan dihasilkannya	Adanya muatan baru pedoman, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan pancasila (P-4) atau eka prasetya pancakarsa, dengan 36 butir nilai	Kurikulum 1994 dengan materi PPKn mengusung konsep-konsep nilai pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan		Pada awalnya mata pelajaran tersebut digabungkan menjadi satu, karena isi dari Pendidikan Kewarganegaraan bersumber dari Pancasila itu sendiri. Kemudian dipecah	Misinya yaitu adanya pendidikan nilai dan moral. mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami	Mengorganisasikan substansi kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD

		ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu moral Pancasila harus diajarkan secara intensif kepada siswa lewat pendidikan formal, dan PMP menjadi sarannya (Muchson AR, 2004: 35).	Buku Paket PMP untuk semua tingkat pendidikan di sekolah, (3) P-4 tidak hanya diberlakukan di sekolah tetapi juga masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran. (4) Bidang studi PMP materinya didominasi P-4.	pancasila sebagai muatannya.	masyarakat Indonesia. Sedangkan Pendidikan Pancasila masih tetap berperan sebagai <i>core</i> atau <i>concerto</i> -nya dan pendidikan kewarganegaraan sebagai <i>accompaniment</i> -nya.		menjadi mata pelajaran sendiri karena Pendidikan Kewarganegaraan dianggap penting untuk diajarkan kepada siswa. Hal tersebut karena dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan materi kewarganegaraan yang lebih luas dan sumbernya tidak hanya langsung dari Pancasila (Sudiardjo, 2013: 117)	dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan PKn 2006 membentuk karakter warga negara kritis, partisipatif, cerdas, rasional dan kreatif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi (Winarno, 2013:2-3).	Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Winarno, 2013: 5).
11.	Kelemahan	Kurikulum 1975 setelah adanya ketetapan MPR ini, pembentukan manusia Indonesia mengalami beberapa kendala kontradiksi	1). P4 tidak bisa memantau secara detail dalam praktisnya PMP karena masih banyak kekurangan. 2). Buku pedoman Pendidikan		Kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan	Azis Wahab & Sapriya (2007: 298) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 memiliki kelemahan	Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Baru, terjebak sebagai alat kepentingan rezim, pengagungan harmoni (selaras, serasi, dan	Depdiknas tahun 2012 dinyatakan bahwa PKn 2006 telah berjalan kurang lebih 5 tahun mendapat berbagai masukan atas kekurangan	Sosialisasi belum menyeluruh dan belum diterapkan pada semua sekolah materi pelajaran PPKn dan terlebih banyak memiliki kendala dari segi buku paket materi kurang jelas dan referensi serta

		<p>praksisnya dalam jasmani dan rohaninya. Kesulitan PMP dengan content Pancasila menuai ketika hanya sampai dihapalkan saja tidak di priksa praxis dan keberlangsungan hidupnya di masyarakat.</p>	<p>Kewarganegaraan yang berjudul “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” dinyatakan tidak berlaku lagi. 3) Penataran membuat masyarakat kebingungan dan dijadikan sebagai proyek penguasa. 4) PMP kontennya belum bisa mandiri secara kokoh</p>		<p>moral yang behavioristik, Ketakonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya. Mengakibatkan beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran.</p>	<p>antara lain: 1) kurikulumnya banyak diwarnai oleh perspektif atau kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara, 2) topik-topik yang diangkap lebih mengedepankan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung “sepihak” dan “monolog” untuk mendukung kelanggengan</p>	<p>seimbang), dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dan konflik. Ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak menarik dan termarginalkan (Samsuri, 2010: 6).</p>	<p>atau kelemahan yang ada, yakni (1) secara substansial, PKN lebih terkesan dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan dominasi pembelajaran kognitif saja</p>	<p>bimbingan yang lainnya. selain itu <i>overlapping content</i></p>
--	--	---	---	--	---	---	--	---	--

						n orde yang berkuasa.			
12.	Peluang	<p>Perlu Pengembangan <i>Civic Virtue</i> dan <i>civic culture</i> dalam praksis demokrasi.</p> <p>Perlu pengembangan paradigma <i>civic education</i> yang khas untuk kondisi bangsa Indonesia. (Udin S. Winataputra, 2012: 4)</p>	Penyederhanaan P4 di Indonesia	<p>perlu dirancang kebudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial-kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional-pedagogis antara kegiatan-kegiatan di sekolah (Durkheim, 1973; Fraenkel, 1977; CISED, 1999; dan Winataputra, 2000).</p>	Adanya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih generasi, dan pemberdayaan generasi muda untuk masa depan yang menuntut adanya pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan		<p><i>Pertama</i>, tantangan untuk menghadapi kehidupan sosial kultural yang kontemporer di dalam kehidupannya.</p> <p><i>Kedua</i>, tantangan untuk memahami persoalan-persoalan konseptual sebagai bekal untuk menganalisis persoalan kontemporer itu. Satu contoh persoalan kontemporer sekarang adalah konflik antaretnis, separatisme, kemiskinan, kebodohan, korupsi yang merajalela, dan masalah lain tentang masalah perilaku</p>	<p>Harus memperbanyak penelitian membahas masalah modus PKn (strategi, model, metode pembelajaran), bukan pada <i>body of knowlegde</i> PKn 2006. Bagi sebagian komunitas PKn, mungkin isi PKn tidak begitu penting, sedang yang penting adalah modus PKn. Bagaimana mengembangkan pembelajaran PKn sehingga menjadi menarik, kreatif, berwibawa dan mencapai tujuannya.</p>	<p>PKn bersifat terpisah (<i>separated</i>) dan pendekatannya juga perlu dikembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa, (Bambang Sudiardjo: 2013: 112).</p>

							immoral.		
13.	Ancaman	Menurut Abdul Azis Wahab (2007: 699) Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif P4 dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat	Materi PMP didominasi P-4 yang indoktrinatif sehingga banyak menuai kritik dari masyarakat khususnya komunitas PKn	Ancaman melemahkan dalam konseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan keterisolasian proses pembelajaran nilai pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.	Ternyata PPKN 1994 secara paradigmatik sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya yang mengakibatkan kerugian negara percumanya pergantian kurikulum namun isi substansinya sama. Demokrasi yang cerdas dan religious yang menjadi karakteristik <i>civic education</i> dalam masyarakat madani belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat-bangsa Indonesia. <i>lawlessness</i> atau ketidakpatuhan hukum	<i>lawlessness</i> atau ketidakpatuhan hukum yang melanda semua lapisan masyarakat bangsa saat itu (Winataputra, 2012: 7).	Telah terjadi krisis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selama ini orientasi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan konsep keilmuan, namun sangat lemah pada pengalaman pembelajaran peserta didik (Winarno, 2013: 4).	aspek <i>content</i> , menimbulkan kontroversi dan perdebatan dikalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademik. dianggap lebih banyak berorientasi pada materi dan evaluasi pelajaran daripada proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini mengakibatkan kerjasama pendidik dan orang tua hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak. (Winarno, 2013: 4)	Kritik tajam terhadap kemas kurikulum adalah karena dianggap lebih banyak berorientasi pada materi dan evaluasi pelajaran daripada proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini mengakibatkan kerjasama pendidik dan orang tua hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak (Winarno, 2013: 4).

					yang melanda semua lapisan masyarakat bangsa saat itu (Winataputra, 2012: 7).				
14.	Solusi	<p>Mempertahankan muatan materi Pancasila dan UUD 1945. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontologi dasar ilmu politik khususnya konsep <i>politic democracy</i> maka digunakan untuk aspek <i>duties and rights of citizen</i>. Sebenarnya P4 dan GBHN itu tidak ada yang salah, manusianya yang menyalahgunakannya sehingga perlu pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi</p>		<p>PPKn perlu dirancang pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial-kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional-pedagogis antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan di luar sekolah sedangkan pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau <i>tought</i> dengan</p>		<p>Pembudayaan nilai-moral lebih banyak dipelajari atau <i>learned</i> dengan peran guru/dosen/penatar/mangala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat dominatif</p>	<p>PKn bersifat terpisah (<i>separated</i>) dan pendekatannya jangan berorientasi pada pengalaman (<i>experience centered</i>) dengan pola pengorganisasian lingkungan meluas, melainkan menggunakan belajar sambil berbuat (<i>learnig by doing</i>), belajar memecahkan masalah social sederhana (<i>social problem solving learning</i>), belajar melalui pelibatan sosial (<i>socio-partisipatory</i>)</p>	<p>Tuntutan akan penyempurnaan PKn sesungguhnya terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PKn Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional (Winarno, 2013: 4).</p>	<p>Djahiri (1979) pernah menegaskan bahwa materi PKn hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, penguasaan konsep dalam PKn memiliki kedudukan yang penting selain</p>

		terhadap pengembalaian eksistensi P4 yang bebas dari birokratik.		peran guru/dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat integratif.			<i>learning</i> ), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural dalam lingkungan sekitar sampai tingkat provinsi ( <i>enculturation and socializen</i> ).		aspek afektif dan perilaku.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

(Sumber: Analisis diolah peneliti dari kajian perkembangan kurikulum PKn SMA tahun 1975-2013, Puskur; Depdiknas).

Berdasarkan hasil penelitian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum 1975-2013 adalah untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas dan bertanggungjawab (*to be good, smart, and responsibility citizens*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari 3 akar ilmu pada ilmu pengetahuan yaitu: nilai moral, hukum dan politik. Secara filosofis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, serta solusi memberikan pengaruh yang luar biasa pada eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum 1975-2013. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kuat ketika kurikulum tahun 1975, 1984 dan 1994 yang mengusung unsur utama pada nilai moral, namun unsur ilmu hukum dan ilmu politik dimarginalkan. Kelemahan pada kurikulum ditahun itu adalah adanya pihak birokratik yang berkuasa dengan sengaja ikut andil dalam indoktrinasi mengembangkan dan memainkan peranannya untuk terus melanggengkan kekuasaan sebagai pencitraan. Beriringnya waktu peluang kurikulum ini memberikan jalan besar mata pencaharian bagi para pakar dan pengembang Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan pelatihan dan penataran pada P4 di sektor pendidikan masyarakat dan pegawai negeri ataupun swasta. Ancaman yang terjadi banyaknya kritik tajam dari para komunitas Pendidikan Kewarganegaraan karena banyaknya ketimpangan pendidikan yang memberikan efek pada hasil pembelajaran siswa menjadi tidak bermakna bahkan adanya ketidak patuhan para pemuda pelajar Indonesia dikala tahun 1999 yang secara serentak melawan rezim orde baru yang sesat itupula kekuatan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijatuhkan melalui keputusan presiden B.J. Habibie. Solusi pada kurikulum ini jikaberawal dari pemerintah maka yang bisa memberhentikan/menghilangkannya adalah hanya melalui pemerintah pula, hal ini dilakukan demi kelangsungan Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis dan tanpa adanya unsur paksaan lagi.

Kurikulum 2004, 2006 dan 2013, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki efek

yang mendalam sejak perubahan orde baru, seolah kekuatan moral sudah mulai kritis bahkan seolah tidak dibutuhkan lagi, padahal pada kurikulum ini warganegara Indonesia merindukan adanya pendidikan nilai moral yang mendalam hingga meresap pada masyarakat lagi, yang tanpa adanya kepentingan birokratik dan pelanggaran kekuasaan yang otoriter melainkan dengan cara demokratis, damai, dan merakyat. Kuatnya kurikulum ini diawali dengan ilmu hukum dan politik namun nilai moralnya sangat tidak dijadikan panduan lagi seolah kebosanan dan rasa takut terulang kembali seperti di masa silam. Solusinya Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi bangkit ketika kurikulum mendatang mulai dilakukan revisi, reposisi, dan revaluasi pada konten secara komprehensif dengan melihat substansi filosofis nilai moral sebagai bahan utama dan substansi ilmu hukum dan politik sebagai penunjang/pelengkap keberhasilan warganegara yang baik, cerdas dan demokratis. Penelitian ini menitik beratkan pada solusi utama sebagai jalan membentuk Pendidikan kewarganegaraan yang maju dan modern dengan berbasis nilai moral berkarakter, berwatak Pancasila, yang taat dan patuh pada hukum bangsa dan negara Indonesia, dengan cara menjalankan dunia birokrasi politik yang damai, jujur, adil, dan demokratis.

## **Pembahasan**

### **Makna filosofis dan materi Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum Tahun 1975-2013 Sekolah Menengah Atas di Indonesia**

#### **1. Makna filosofis PKn SMA di Indonesia**

Makna filosofis PKn SMA itu menitikberatkan pada penciptaan pelajar yang beradab/bijaksana dalam segala hal, dimana bijaksana itu merupakan tingkat tertinggi dari segala perilaku, dimana maknanya yaitu: filosofis PKn sebagai pementukan watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban, filosofis PKn sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa, filosofis PKn sebagai mata pelajaran kurikuler, filosofis PKn sebagai jatidiri kekuatan pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia dan filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural fluralisme

bangsa dalam satu cita-cita nasional dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.

Makna filosofis Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:

- a. Filosofis PKn sebagai pembentukan watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban

Filsafat PKn sebagaimana filsafat pendidikan disiplin ilmu dipengaruhi oleh faham filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat ilmu-ilmu sosial baik dalam kajian ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Dengan ini Branson (1998:12) mengatakan "...warganegara tidak hanya harus sadar akan hak-hak mereka saja, tetapi juga harus menggunakan hak-hak itu secara bertanggung jawab dan merekapun harus menunaikan tanggung jawab pribadi dan kewarganegaraan yang diperlukan bagi suatu masyarakat yang adil, bebas, dan berdaulat.

Sebagai warga negara kita harus mengenal hak-hak dan kewajiban, dan juga kewajiban negara terhadap warganya. Sejak kecil setiap murid sudah diajarkan untuk bersikap kritis demokratis terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan kewajiban negara terhadap warganya. Maka, warganegara akan menjadi segan terhadap pemerintahan dan taat pada hukum pemerintahan jika kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan sudah diberikan pemerataan pada rakyatnya.

- b. Filosofis PKn sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa

"...UUD harus hidup dalam sanubari bangsa Indonesia. Baik dalam segi pengetahuan terhadap UUD maupun dalam bertingkah laku yang sesuai dengan UUD. Sehingga tugas PKn adalah untuk mendekatkan warga negara dengan konstitusi bukan hanya melalui pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal agar negara Indonesia mampu menjadi negara yang demokratis yang menjamin kesejahteraan (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Warga negara yang beriman dan bertakwa serta memiliki hati yang bersih menjadi dambaan semua negara, begitupun dengan Indonesia yang memberikan nilai kebebasan dalam beribadah, persaudaraan, tanpa mengenal kasta dan derajat yang

dipraksiskan dalam *living reality* dengan bentuk moral yang terpuji sebagai contoh panutan dan tuntunan bagi setiap yang melihatnya, sebagai sosok yang diidolakan yang dapat dijadikan tiruan bagi yang lain terhadap sikap prilakunya/akhlaknya dalam setiap kehidupan dimanapun kapanpun dia berbuat yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan *happy ending* di sekitarnya.

- c. Filosofis PKn sebagai mata pelajaran kurikuler

Domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas ilmiah. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosial-kultural adalah konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat. Domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial-kultural satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi kebajikan dan kebudayaan kewarganegaraan (*civic virtue and civic culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keyakinan diri kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kemampuan kewarganegaraan. Oleh karena itu objek kajian PKn saat ini sudah lebih luas daripada embrionya, sehingga bidang kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosial-kultural PKn benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Karakteristik inilah yang dijadikan indikasi bahwa PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi yang bercirikan sifat multifaset (Sapriya, 2012: 30-31).

Salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*".

Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, Ed., 2012).

d. Filosofis PKn sebagai jatidiri pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia

Jatidiri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh kembang selama mata hati manusia bersih, sehat dan tidak tertutup. Jatidiri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang dapat mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga baik. Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa (Udin Saripudin Winataputra, 2011).

Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sesuai fungsi dan tujuannya pendidikan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai

landasan operasional penuh dengan pesan “yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beban dan tanggung jawab dari negara secara hukum dan fundamental sebagai tugas untuk melaksanakan pembenahan dan pembentukan watak moral pancasila sebagai jatidiri asli bangsa dengan memperkokoh pemajuan IMTAK (iman dan takwa) yang bersih lahir batin dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) negara yang mampu berdayasaing internasional dalam era global yang dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan negara dan bangsa.

e. Filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural fluralisme bangsa dalam satu cita-cita nasional dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.

“...aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Visi Pendidikan Nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003). Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, DepDikNas berhasrat untuk berhasrat pada tahun 2025 menghasilkan INSAN INDONESIA YANG CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Cerdas komprehensif tersebut meliputi : cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, cerdas kinestetik... (Budimansyah & Suryadi, 2008: 20-22)

Sikap pengokohan dalam setiap perbedaan diberbagai bidang baik agama, adat, budaya, dan kepercayaan lainnya merupakan media perekat yang harus

diberikan suplemen khusus dari ruh Pancasila oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warganegara yang saling menganggap saudara dalam setiap perbedaan dengan sikap ramah tamah dan tolong menolong yang dapat menumbuhkan kepercayaan atas segala perbedaan dalam bangsa dan negara, yang terciptanya aturan masyarakat yang akan membawa kita pada rasa adil, tentaram, aman dan damai.

## 2. Kebermaknaan materi PKn pada kurikulum tahun 1975-2013

Makna materi kurikulum PKn tahun 1975 yaitu sejak adanya penambahan P4 dalam Pendidikan Kewarganegaraan ditahun 1978 pada kurikulum PKn tahun 1975 memiliki dampak yaitu: (1) beban politik pada pendidikan nasional itu makin terasa berat ketika pelajaran PMP itu digunakan penguasa dengan indoktrinasi yang kuat sebagai alat untuk memanusiaikan Indonesia dengan pedoman pancasila pada PKn dengan nama istilah warganegara pancasilais, (2) Penataran P-4 pun kemudian menjadi proyek baru bagi para pengampu mata pelajaran Pancasila, (3) pendidikan nasional mengambil langkah-langkah dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila diseluruh lapisan masyarakat. (4) Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah. (5) materi penataran P4 untuk PNS pada hakekatnya sama dengan materi PMP untuk para siswa. Perbedaannya, PMP adalah “penataran P4” untuk peserta jenjang pendidikan formal, sedangkan penataran P4 itu sendiri untuk masyarakat luas termasuk PNS.

Kemudian makna kurikulum PKn pada tahun 1984 ialah: (1) PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). (2) Salah satu perbedaan Kurikulum 1975 dengan Kurikulum 1984 adalah masalah keikutsertaan peserta didik untuk aktif dalam proses memperoleh hasil belajar serta mengolah perolehan tersebut. (3) (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-

nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. (4) materi kurikulum 1984 dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah. (5) Terjadi tumpang tindih antara P4, PSPB, PMP, dan Sejarah Nasional. Tumpang tindih tersebut akan mengakibatkan hilangnya waktu yang bisa dipakai untuk keperluan lain, atau mendesak mata pelajaran lain yang berdampak kurang baik.

Makna pada kurikulum PKn tahun 1994 ialah: (1) perluasan kajian P4 di sekolah mencakup nilai, moral, dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara namun akibat dari model Pendidikan Kewarganegaraan yang menonjolkan kepentingan rezim ialah mata pelajaran PMP atau PPKn menjadi sangat tidak menarik, formalistik, proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahnya. (2) Menerapkan pelajaran muatan lokal, yaitu kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah. Muatan lokal meliputi: Pendidikan budaya lokal, Pendidikan Keterampilan, dan Pendidikan Lingkungan. (3) Peningkatan pengamalan sejumlah sikap, perilaku terpuji serta sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila dan UUD 1945. (4) Dampak positif berlakunya sistem semester ini adalah terjadinya penyederhanaan pelaksanaan evaluasi belajar, yang semula tiga kali dalam setahun, menjadi dua kali. Selain itu, hari efektif belajar makin banyak. (5) mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa. Salah satu nilai luhur itu ialah perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya makna pada kurikulum tahun 1994 dan suplemen tahun 1999 ialah: (1) Pencabutan P-4 sebagai upaya menghindari indoktrinasi pengamalan Pancasila. Pencabutan P-4 sebagai substansi kajian Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan sebuah berkah, karena membebaskan beban ideologis-indoktrinatif dalam pembentukan warga negara yang baik. (2) Tap MPR tentang P-4 ini akhirnya dicabut dalam Sidang Istimewa MPR, pelaksanaan P4 sebagai ketimpangan “antara laku dan kata.” Pada sisi lain, kelompok masyarakat yang kecewa dengan pencabutan Tap itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam P-4 itu sebenarnya tak ada yang salah. (3) Perubahan kebijakan pendidikan sentralistik ke desentralistik yang ditandai dengan perubahan peran negara dalam pendidikan. (4) kegiatan mengkaji GBPP PPKn yang melibatkan para ahli Mata Pelajaran PPKn, pengembang kurikulum, dan guru-guru PPKn dampaknya beberapa pokok bahasan pada kelas II dan III SMU tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ditunda sampai adanya rujukan. (5) Ternyata pembahasan materi dalam buku pelajaran pada suplemen 1999 belum mencerminkan artikulasi materi yang sesungguhnya. Dampaknya banyak para guru merasakan adanya kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Makna kurikulum PKN tahun 2004 yaitu: (1) Munculnya KBK karena kurikulum 1994 menuai banyak penilaian yang terlalu seret materi, tumpang tindih (*over lapping*), terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik. (2) Perbedaan pokok antara kurikulum konvensional (Kurikulum 1994 dan sebelumnya) dengan KBK yaitu; kurikulum konvensional menekankan pada isi (*content based*) sedang KBK mengutamakan kemampuan (*competency based*), kurikulum konvensional berbasis pada buku teks (*textbook oriented*) sedang pada KBK bahan ajar yang dipilih menggunakan bantuan multimedia, evaluasi pada kurikulum konvensional didasarkan pada kecepatan kelompok, sementara KBK melihat kecepatan individual. Itu sebabnya, *feed back* atau umpan balik dalam kurikulum konvensional dilakukan tidak secara langsung sedangkan KBK menerapkan umpan balik seketika, kurikulum konvensional berbasis waktu, sedangkan KBK menerapkan kurikulum berbasis kinerja, kurikulum konvensional menjabarkan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus sedangkan KBK menjabarkan kompetensi dasarnya melalui hasil belajar beserta

indikatornya (*learning outcomes*) yang dibuat secara obyektif. (3) Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (4) Pendidikan Kewarganegaraan sering diidentikkan dengan pendidikan budi pekerti. Padahal semestinya kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yakni sebagai warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negaranya. Sedangkan rumusan dalam naskah Kurikulum 2004 Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (5) Pendidikan Kewarganegaraan ini dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum. Sementara itu, ketika reformasi politik dan hukum nasional bergulir, paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang masih bercorak hegemonik cenderung menjadi tidak menarik dan termarjinalkan.

Kemudian makna kurikulum PKN tahun 2006 ialah: (1) Secara substansi KTSP sama dengan KBK. KTSP terkait dengan otonomi manajemen sekolah, artinya sekolah harus aktif mengembangkan kurikulum bukan menunggu kurikulum pusat, pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan di pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. (2) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (3) Ruang lingkup materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam KTSP 2006 meliputi Persatuan dan kesatuan bangsa, Norma, hukum, dan peraturan, Hak asasi manusia, kebutuhan warganegara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, Globalisasi. (4) Akibat dari model Pendidikan Kewarganegaraan yang menonjolkan kebebasan mata pelajaran PKn menjadi sangat menarik, proses pembelajaran banyak melahirkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahan. Namun dampak kebebasan kurikulum ini ada banyaknya perubahan-perubahan yang kurang baik pada perkataan sikap dan prilaku moral dan nilai dalam watak karakter siswa dilingkungan sekolah atau luar sekolah. (5) Pendidikan Kewarganegaraan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila, namun sarat dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum.

Selanjutnya makna yang terkandung dalam kurikulum PKn tahun 2013 yaitu: (1) Alasan perubahan PKn 2013 dari PKn 2006 karena memiliki kekurangan atau kelemahan yakni secara substansial, PKn lebih terkesan dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; secara metodologis, ada kecenderungan dominasi pembelajaran kognitif, sehingga dimensi afektif dan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal. Kadang dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang menarik; kurang menantang berpikir tingkat tinggi; bersifat hafalan; materi dianggap abstrak, sulit, dan kurang dirasakan manfaat praktisnya; bahkan banyak guru yang merasa kesulitan untuk membelajarkan kepada peserta didik. Kritik tajam terhadap kemas kurikulum hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak. Kajian Pusat Kurikulum tahun 2007 juga menunjukkan bahwa telah terjadi krisis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Selama ini orientasi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan konsep keilmuan, namun sangat lemah pada pengalaman pembelajaran peserta didik. (2) PKn memiliki beberapa kemampuan

yang merupakan pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*) yang intinya ialah membentuk keberadaban/kebijakan warganegara. (3) Pada Pendidikan menengah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Tidak relevan lagi adanya pemisahan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Secara idiil dan instrumental konsep, visi, dan misi serta muatan PPKn tersebut sudah secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral dengan konten pembudayaan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. (5) Mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter namun kenyataannya jumlah jamnya masih terlalu pendek dan tidak dimasukkan dalam ujian nasional sehingga melemahkan dan membuat siswa PPKn itu kurang penting padahal kurikulum 2013 berangkat dari 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka tunggal ika, UUD 1945, dan NKRI. Namun praktisnya PPKn kurang diperhatikan oleh para pakar pembuat kurikulum bahkan ditakutkan mungkin akan kembalinya dipergunakan lagi oleh penguasa/pemerintah sebagai alat indoktrinasi, padahal indoktrinasi itu jika digunakan dengan baik pasti akan menghasilkan yang terbaik karena indoktrinasi akan menimbulkan kepatuhan dan ketaatan pada hakikatnya warganegara pada pemerintah.

### **Analisis SWOT Perkembangan Kurikulum PKn Jenjang SMA Tahun 1975-2013 di Indonesia**

Analisis SWOT PKn merupakan evaluasi fakta dan data perubahan dari kurikulum PKn

dimana substansi, model serta nama akan berubah sesuai perkembangan jaman untuk membentuk PKn lebih modern yang multifaset dalam menangani segala permasalahan warganegara dengan berlandaskan pada Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk mempermudah maka makna dari analisis SWOT perkembangan kurikulum ini dapat dipersingkat oleh peneliti sebagai berikut yaitu:

#### 1. Kekuatan versus Kelemahan

Alasan perubahan nama pelajaran menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum tahun 1975, adalah masa Orde Baru ingin melakukan koreksi terhadap Orde Lama yakni ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun kenyataannya lepas dari konteks pendidikan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi dengan bukti nyata hal itu berdampak pada terjadinya krisis operasional pedagogis. Kemudian Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studi tujuannya adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun praksis dikehidupannya berlainan karena hanya menggunakan sistem hapalan.

Pada Kurikulum tahun 1984, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang bertujuan untuk mempertebal akhlak dan mempertinggi budi pekerti para siswa sehingga dia mampu meghadapi dan menyikapi segala macam perubahan kondisi kehidupan di masa yang akan datang namun dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Adanya muatan baru pedoman, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan pancasila (P-4) atau eka prasetya pancakarsa, dengan 36 butir nilai pancasila sebagai muatannya sedangkn pengembangan *civic virtue* dan *civic culture* tidak dijadikan jati diri PMP malah menjadikan beban berat pada PKn.

Pada kurikulum tahun 1994, “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) telah berubah nama menjadi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn) tujuannya ialah untuk mempertajam dan menyempurnakan, mempersingkat P4 agar menjadi lebih bermanfaat dan bermakna lebih pada masyarakat bangsa dan negara Indonesia sedangkan pada proses belajar mengajar saja belum mencapai

tujuan PMP yang diharapkan, bahkan kelemahan dalam hal ini pada konseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya. Mengakibatkan beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran. Kemudian kurikulum 1994 dengan materi PPKn mengusung konsep-konsep nilai pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sedangkan kenyataannya kurikulum 1994 menuai banyak penilaian dari masyarakat sebagai kurikulum yang terlalu sarat materi, tumpang tindih (*overlapping*), terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik. Bahkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Kurikulum tahun 2004, isi dari Pendidikan Kewarganegaraan bersumber dari Pancasila itu sendiri, maka dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan materi Kewarganegaraan yang lebih luas dengan mengedepankan materi ketatanegaraan dan sumbernya tidak langsung dari Pancasila sedangkan realitas di lapangan menunjukkan adanya gejala Pendidikan Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan moral yang cukup memadai.

Pada kurikulum tahun 2006, tujuan PKn 2006 adalah membentuk karakter warga negara kritis, partisipatif, cerdas, rasional dan kreatif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan dalam rangka berhubungan dengan bangsa lain. Materi PKn sebagai mata pelajaran mengusung misi pendidikan nilai dan moral, mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI

1945. Sedangkan secara substansial, PKn lebih terkesan dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional, dan secara metodologis, ada kecenderungan dominasi pembelajaran kognitif, sehingga dimensi afektif dan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal.

Pada kurikulum tahun 2013, pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang pembelajaran moralnya belum dirasakan secara menyeluruh oleh peserta didik. Namun usaha pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dilakukan melalui penerapan berbagai pembelajaran inovatif, kreatif, dan kontekstual sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik secara utuh. Pengalaman belajar diseleksi dan diorganisasikan dengan menggunakan antara lain: (1) pendidikan nilai dan moral; (2) pendekatan lingkungan meluas; (3) pembelajaran aktif; (4) pemecahan masalah; (5) pendekatan kontekstual; (6) pembelajaran terpadu; (7) pembelajaran kelompok (8) praktik belajar kewarganegaraan; (9) pemberian keteladanan; dan (10) penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang berkarakter sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Sedangkan beberapa kelemahan kenyataannya yaitu materi yang diajarkan cenderung menyulitkan guru dan menyusahkan peserta didik. Banyaknya hambatan pembelajaran dikarenakan sosialisasinya mengalami hambatan dan keterlambatan sehingga materi dianggap terlalu dipaksakan untuk segera dikuasai guru, bahkan buku pegangan siswa dan guru belum lengkap dan belum memiliki kredibilitas dan berkualitas sesuai isi sub ruanglingkup PKn. Sehingga hal ini akan mengakibatkan pembelajaran PKn menjadi tidak maksimal sesuai tujuan pendidikan nasional dan institusional sekolahnya.

## 2. Peluang versus Ancaman

Pada Kurikulum tahun 1975, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu Pengembangan *Civic Virtue* dan *civic culture* dalam praksis demokrasi sedangkan kenyataannya konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dengan penekanan yang sangat berlebihan

terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya. Bahkan materi PMP didominasi P-4 yang indoktrinatif sehingga banyak menuai kritik dari masyarakat khususnya komunitas PKn.

Pada Kurikulum tahun 1984, P4 untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat adalah untuk menciptakan manusia pancasilais yang setia pada Pancasila dan UUD 1945, sedangkan kenyataannya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, malah dijadikan instrumen birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat dalam melanggengkan kekuasaan pemerintah.

Kurikulum tahun 1994, PPKn perlu dirancang pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial-kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional-pedagogis antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan di luar sekolah sedangkan pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau *tought* dengan peran guru/ dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat integratif. Dampak instruksional dan pengiringnya lebih bersifat pengetahuan atau *knowledge oriented*. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dapat dikatakan PMP yang disampaikan dalam PPKn disekolah dan penataran P-4 diberbagai lapisan masyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (*meaningless*). Bahkan yang lebih parah lagi tampak pada *lawlessness* atau ketidakpatuhan hukum yang melanda semua lapisan masyarakat bangsa saat itu dan Pendidikan Kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaatkan

sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik

Kurikulum tahun 2004, PKn bersifat terpisah (*separated*) dan pendekatannya jangan perlu dikembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa, melainkan suatu pembelajaran yang mampu merealisasikan tujuan akhir dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu perwujudan nilai-nilai dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari sedangkan Ancaman dari aspek *content*, PKn SMA/MA dalam mata pelajaran Kewarganegaraan pada dasarnya pernah menimbulkan kontroversi dan perdebatan dikalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademik. Kritik tajam terhadap kemasan kurikulum adalah karena dianggap lebih banyak berorientasi pada materi dan evaluasi pelajaran daripada proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini mengakibatkan kerjasama pendidik dan orang tua hanya sebatas kepentingan penguasaan materi, bukan penekanan pada pembinaan watak.

Pada kurikulum tahun 2006, peluangnya ialah Bagaimana mengembangkan pembelajaran PKn sehingga menjadi menarik, kreatif, berwibawa dan mencapai tujuannya. Pengembangan dalam salah satu dari lima tradisi *social studies* yakni *citizenship transmission* hingga menghasilkan asaran akhir pelajaran PKn yaitu perwujudan nilai-nilai dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan untuk dimanfaatkan untuk kekuasaan suatu rezim politik. Bahkan PKn dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang menarik; kurang menantang berpikir tingkat tinggi; bersifat hafalan; materi dianggap abstrak, sulit, dan kurang dirasakan manfaat praktisnya; bahkan banyak guru yang merasa kesulitan untuk membelajarkan kepada peserta didik.

Pada kurikulum tahun 2013, Pengkajian *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat, materi "*content*" PKn, dengan merujuk pada gagasan "*content*" dan sasaran dalam *social studies*, hendaknya mempertimbangkan hal-hal

yang bersifat *informal content* (*the need of society*), *formal disciplines* (*social sciences*), dan (*the responses of pupils/the needs of children*) dengan mempertimbangkan pula kebutuhan siswa, masyarakat, dasar negara, cita-cita, dan tujuan nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban, perlunya pengembangan 5 pilar kebangsaan jangan hanya 4 pilar karena dianggap kurang sempurna. Kemudian perlunya membentuk buku sebagai bahan ajar yang berkualitas sesuai isi sub ruang lingkup PKn yang dikembangkan dengan bimbingan para instruktur pengembang kurikulum PKn. Sedangkan ancamannya ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013, keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN) masih diberlakukan, mata pelajaran non UN dikesampingkan padahal juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Jika PKn gagal membentuk watak karakter/watak kepencasilaan anak bangsa maka PKn dapat semakin dikesampingkan. Pkn terancam jikamasih ada perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, seks bebas, judi, dan tawuran.

### 3. Solusinya secara singkat

Pada kurikulum tahun 1975, mempertahankan muatan materi Pancasila dan UUD 1945. Sebenarnya P4 dan GBHN itu tidak ada yang salah, manusianya yang menyalahgunakannya sehingga perlu pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi terhadap pengembalian eksistensi P4 yang bebas dari birokratik dan dalam rangka penumbuh kembangkan nilai moral secara cerdas dan elegan bukan melalui paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri/indoktrinasi melainkan dengan cara yang halus kasih sayang secara bijak.

Pada kurikulum tahun 1984, 1) Muncul Kepmen P&K No.0461/U/1984 tentang perbaikan kurikulum dikeddasmen dan Kepmen P&K No.0209/U/1984 tentang perbaikan kurikulum SMA. 2) Dikenal dengan kurikulum

1984, dikenal dengan keluwesan program. 3) Kurikulum 1984 tidak hanya menekankan pada ranah pengetahuan (kognitif) saja, melainkan juga menekankan ranah afektif (moral) dan psikomotor (perbuatan). Mempertahankan muatan materi Pancasila dan UUD 1945 dan mengajarkan P4 tidak boleh dengan menggunakan secara birokratik karena hal tersebut akan menghambat demokrasi pendidikan kita.

Pada kurikulum tahun 1994, pembudayaan nilai-moral lebih baik diajarkan atau *tought* dengan peran guru/dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat dominatif. Dampak instruksional dan pengiringnya jangan bersifat pengetahuan atau *knowledge oriented* saja. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila jika adanya penyajian pencontohan dan bimbingan dalam prilakunya agar bermakna dan bermanfaat, karena Pancasila tidak hanya sebagai alat simulasi akan tetapi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri bukan melalui paksaan dan tekanan. Sebenarnya P4 dan GBHN itu tidak ada yang salah, manusialah yang menyalahgunakannya sehingga perlu pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi terhadap pengembalian eksistensi P4 yang bebas dari birokratik.

Pada kurikulum tahun 2004, Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan nasional, khususnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi harus ada *political will* dan *good will* dari semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan ini. Sasaran akhir pelajaran PKn yaitu perwujudan nilai-nilai dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Berorientasi pada pengalaman (*experience centered*) dengan pola pengorganisasian lingkungan meluas, melainkan menggunakan belajar sambil berbuat (*learnig by doing*), belajar memecahkan masalah social sederhana (*social problem solving learning*), belajar melalui pelibatan sosial (*socio-partisipatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural dalam lingkungan sekitar sampai tingkat provinsi

(*enculturation and socializen*). Sekarang sudah saatnya para pakar dan praktisi PKn harus duduk bersama untuk melihat sebenarnya apa yang seyogianya dikemas untuk peserta didik. Perlu dipertimbangkan dalam proses mengemas *content* agar memperhatikan tantangan saat ini. Ada dua hal tantangan warga negara pada masa kontemporer. *Pertama*, tantangan untuk menghadapi kehidupan sosial kultural yang kontemporer di dalam kehidupannya. *Kedua*, tantangan untuk memahami persoalan-persoalan konseptual sebagai bekal untuk menganalisis persoalan kontemporer itu. Satu contoh persoalan kontemporer sekarang adalah konflik antaretnis, separatisme, kemiskinan, kebodohan, korupsi yang merajalela, dan masalah lain tentang masalah perilaku immoral.

Pada kurikulum tahun 2006, Pancasila tidak hanya sebagai alat simulasi akan tetapi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5) komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan.

Pada kurikulum tahun 2013, Melalui program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diusung oleh MPR sejak 2009, maka materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 memuat program tersebut. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegar meliputi *Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)* menjadi materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila tidak hanya sebagai alat simulasi akan tetapi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5) komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan. Maka materi PKn hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan

pengamalan Pancasila dengan ketaatan pada hukum UUD NRI 1945, melandaskan budaya demokrasi yang Berbhineka Tunggal Ika yang dicakup dalam satu wilayah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terpisahkan/memisahkan diri sebagai pembinaan untuk mengevaluasi pembentukan watak bangsa.

## SIMPULAN

Pertama Makna filosofis PKn SMA itu menitikberatkan pada penciptaan pelajar yang beradab/bijaksana dalam segala hal, dimana bijaksana itu merupakan tingkat tertinggi dari segala perilaku, dimana maknanya yaitu: filosofis PKn sebagai pementukan watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban, filosofis PKn sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa, filosofis PKn sebagai mata pelajaran kurikuler, filosofis PKn sebagai jatidiri kekuatan pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia dan filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural fluralisme bangsa dalam satu cita-cita nasional dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.

Kedua kekuatan PKn pada kurikulum tahun 1975-1994 adalah pada nilai moralnya sebagai pembentukan watak, kemudian pada kurikulum tahun 2004 PKn terletak pada kekuatan politik, sedangkan kekuatan kurikulum PKn tahun 2006 terletak pada bidang hukum, namun pada kurikulum 2013 ini adanya kombinasi dari ketiga kekeuatan ini yakni diusung dari nilai moral, politik, dan hukum namun kekuatan utama dalam kurikulum ini masih terlihat seras pada substansi politik dan hukum namun unsur moralnya malah cuman sebagai bahasan kecil saja. Kemudian sebagai pendorong lainnya didapat dari Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang memiliki visi, tentulah membutuhkan warga bangsa yang juga memiliki wawasan, kesadaran dan perilaku yang mendukung visi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk penggabungan individu-individu agar menjadi warga bangsa yang memiliki karakter yang seturut yang visi kebangsaanya.

Ketiga Kekuatan PKn ada pada Pancasila, UUD NRI 1945, politik, hukum, nilai, moral,

kearifan lokal dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. Kelemahan PKn ada pada sisi pengajaran yang bersifat monoton tidak inovatif (*overload and overlapping content*) dan lebih menitik beratkan hanya pada kognitif, sedangkan afektif dan psikomotorik ditiadakan serta tidak dimasukan pada ujian nasional. Peluang PKn masih perlunya banyak perkembangan keilmuan dalam *body of knowledge* berbasis penguatan utama moral. Ancaman PKn banyaknya pelajar bertawuran dan seksbebas yang menjadikan moral anak bangsa lemah dan bertindak tidak melihat nilai Pancasila (berkata dan berperilaku tanpa nilai). Solusi PKn melalui pembelajaran dan proses praktik siswa di sekolah yang diawasi dan dinilai sebagai bentuk evaluasi moral dan perilaku siswa. Materi PKn yang terbaik adalah berasal Indonesia asli bukan jiplakan dari negara lain, diantaranya adalah Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda dan Merah Putih.

## DAFTAR RUJUKAN

- Cholisin. (2006). Pemilihan kepala daerah dalam rangka perspektif peran PKn. Yogyakarta: Jurnal Civics, Volume 3, No. 2, Desember 2006, halaman 60-78.
- Creswell. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). Kurikulum sekolah menengah atas 1975a: Buku I ketentuan-ketentuan pokok. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). Kurikulum sekolah menengah atas 1975b: Buku II B bidang studi pendidikan moral Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1985). Mengemban masa depan: Kumpulan sambutan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, buku kedua. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). Perkembangan pendidikan dasar dan menengah tahun 1945-1999. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(1993). Kurikulum 1994 pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). GBPP PPKn suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- Kusuma, Deden Cahaya. (2013). *Analisis Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum 2013*. Bandung: Jurnal Analisis Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia 2013, halaman 1-21.
- Sariono, (2013). Kurikulum Generasi Emas. E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 3, ISSN : 2337-3253, (halaman 1-9).
- Udin S. Winataputra. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Landasan, konteks, bahan ajar dan kultur kelas*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Udin S Winataputra,(2008). "Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa" dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Acta Civicus SPs UPI, 2, (1), 1-16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003e). Kurikulum 2004: Naskah akademik. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2007). Kajian Kebijakan Kurikulum PKn: Naskah akademik. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2010). *Sejarah\_kurikulum tahun 1975-2004*: Naskah akademik. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Winarno. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan persekolahan: Standar isi dan pembelajarannya*. Jurnal Civics, Volume 3, No. 1, Juni 2006 halaman 231-350, Jurusan PKn.H, FISE, UNY.
- \_\_\_\_\_ (2009). *Kewarganegaraan Indonesia: dari sosiologis menuju yuridis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahab, A.A., & Sapriya.(2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung. Alfabeta
- \_\_\_\_\_.(2000). *New paradigm and curriculum design for new Indonesian civic education. Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education*, March 29, 2000, at Bandung.
- \_\_\_\_\_ (2007). Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Ilmu dan aplikasi pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis)*:Bandung.Widya aksara press.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Materi pelatihan dosen pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.